

SOLOPOS

Diterbitkan oleh PT Aksara Solopos
Surat izin: SK Menpen No. 315/SK/
MENPEN/ SIUPP/12 Agustus 1997

Pemimpin Umum: Prof. Dr. H. Sukamandani S. Gitosardjono-Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Suwernin-Pemimpin Perusahaan: Bambang Natir Rahadi-Devan Redaksi: Ahmad Djauhar (ketua), Arief Budisusilo, Y. Bayu Widado, Adhitya Novardi, Anton Wahyu Prihartono, Mulyanto Utomo-Redaktur Pelaksana: Abu Nadhif, Rini Yustinsingih-Redaktur Senior: Mulyanto Utomo-Sekretaris Redaksi: Sri Handayani-Redaktur: Adito M. Asfar, Ahmad Mufid Arjono, Alvari Kunto Prabowo, Anik Sulistyawati, Astrid Prihatni Wisnu Dewi, Ayu Prawitasari, Burhan Aris Nugraha, Denang Nur Ihsan, Haryono, Widyudiyanto, Ichwan Prasetyo, Ivan Indrakusuma, Khaled Hasby Ashidhiqy, Mugi Sunarya, Rahmat Wilsono, Riyanti, R. Bambang Aris S. Rohmah Ermawati, Syiffaul Arifin, Suharsih, Tika Sekar Arum, Tri Wiharto, Yonantha Chandra Premana-Manajer Litbang dan Puskod: Sholahuddin-Staf Redaksi: Akhmal Udayono, Aries Susanto, Arif Fajar S, Asiska Riviyastuti, Ayu Abriyanti K.P., Chrisna Chanis Kara, Eni Widastuti, Farida Trisneningtyas, Hanifah Kusumastuti, Ika Yuniati, Ilimay Yuda Saputra, Indah Setyaning W, Irawan Sapto Adhi, Iskandari, Ivan Andimurtarom, Ikhardini Nur Afifah, Maryana Ricky P.D., Oriza Wilsana, Septhia Rhyantlie, Shogib Angriawan, Triyono, Tri Indriawati, Tutur Indrawati, Boyolali: Hrijah Al Wakhidha; Klater: Ponce Suseno, Taufiq Sidiq Prakoso; Karanganyar: Kurniawan, Sri Sumi Handayani; Wonorejo: Bayu Jatmiko Adi, Trianto Heri Suryono; Sragen: M. Khodij Duhri, Tri Rahayu; Sukoharjo: Botny Eko Wicaksono, Rudi Hartono; Semarang: Insetyonoto; Foto: Ivanovich Aldino, Sunaryo Haryo Bayu; Asisten Manajer Lay Out: Andhi Susanto; Pengembangan Redaksi: Damar Sri Prakoso, Arlyanto.

Penerbit: PT Aksara Solopos-Direksi: Lulu Terianto (Presiden Direktur), Bambang Natir Rahadi (Direktur)-General Manajer Iklan: Muryanti Setyandari-Manajer Iklan: Wahyu Widodo-Manajer Sirkulasi: Diwira Murti Santosa-Manajer EO: Dewi Lestari-Manajer Promosi: Amir Tohari-Aliamand Redaksi/Perusahaan: Griya Solopos Jl. Adisucipto No. 190 Solo 57145 Telp (0271) 724811 (hunting), Faks Redaksi (0271) 724833, Faks Perusahaan (0271) 724850-Pengudan Iklan dan Sirkulasi: (0271) 724811; -Iklan Perwakilan Jakarta: Sari Ariestini, Wisma Bisnis Indonesia Lt. 5-8 Jl. K.H. Mas M. ansyur No. 12A Karet Tenginjan,Tanah Abang Jakarta Pusat 10220, Telp (021) 708928232, 57901023 ext 729 Faks (021) 57901024-Perwakilan Semarang: Jl Sompok Baru No. 79 Semarang Telp (024) 8442852--Rekening Bank: Bank BCA Cabang Singsoran 153-0194708, Bank BNI Cabang Slamet Riyadi No. RE. AC 28035567 Atas nama PT. Aksara Solopos-Harga: Langganan: Rp. 90.000/ bulan-Tarif Iklan: Display Hitam Puthr Rp 24.000/ mm kolom, Berwarna Rp 43.000/mm kolom, Kolom Rp 12.000/mm kolom, Baris Rp 12.000 (minimal 2 baris), Keluarga Hitam Puthr Rp 14.000/ mm kolom, Berwarna Rp 20.000/mm kolom-E-mail iklan: iklan@solopos.com--E-mail: redaksi@solopos.co.id, redaksi@solopos.com--Homepage: www.solopos.co.id --Percetakan: PT Solo Grafiqa Utama. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan *Solopos* dilengkapi identitas dan tidak diperbolehkan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Jika pada kesempatan pertama wartawan tidak dapat menolak pemberian, maka pemberian tersebut akan dikembalikan melalui Sekretaris Redaksi dan diumumkan di harian ini setiap edisi Senin.

Artikel diketik dengan spasi ganda maksimal 6.000 karakter disertai riwayat hidup singkat tentang penulis, foto penulis, nomor rekening bank dan NPWP (jika ada). Artikel harus orisinal dan tidak dikirimkan ke media massa lain. Setiap artikel yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis. Artikel yang dimuat menjadi hak redaksi *Solopos* dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), termasuk di media online. Apabila lebih dari dua pekan tulisan tak dimuat, penulis berhak mengirimkan ke media lain. Honor artikel yang dimuat dapat diambil satu pekan setelah pemuatan.

KAMUS ESPOS

Aset: sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal; kekayaan. Contoh: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sejumlah calon kepala daerah yang berlaga di pemilihan kepala daerah (pilkada) mencoba menyembunyikan aset mereka (*Solopos*, 9 Desember, hal. 2). Sumber: *KBB*; 2008; 92.

Kir: pemeriksaan (misal pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan kendaraan). Contoh: Uji kir merupakan persyaratan yang harus dilalui pemilik atau sopir angkutan umum dan barang sebelum dinyatakan laik jalan (*Solopos*, 9 Desember, hal. 3). Sumber: *KBB*; 2008; 701.

Konsolidasi: perbuatan memperkuat atau memperkuat. Contoh: Besarnya potensi kekurangan pajak menjadi pekerjaan rumah berat bagi pimpinan baru di institusi pajak, apalagi waktu untuk melakukan konsolidasi makin terbatas menjelang akhir tahun (*Solopos*, 9 Desember, hal. 5). Sumber: *KBB*; 2008; 726.

Nyono
Iyo2n.lib57
@yahoo.com

Kepala UPT
Perpustakaan
Institut Seni
Indonesia (ISI)
Solo



Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak gelombang pertama pada 9 Desember 2015 adalah sistem terbaru yang diterapkan untuk memilih kepala daerah. Masyarakat luas berharap sistem baru ini jauh dari segala keajnggalaan.

Sistem yang baru diharapkan membimbing semua pihak, baik para elite politik, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, tokoh intelektual, unsur birokrasi pemerintah, dan masyarakat luas lebih memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, berpolitik secara matang dan dewasa, serta mampu berperilaku sesuai karakter bangsa yang arif, santun, dan bijaksana.

Janji-janji pada masa kampanye yang dikemukakan para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah jarang atau bahkan tidak ada yang menyetujui tema tentang pentingnya budaya membaca, tentang pentingnya budaya literer.

Kita maklumi bersama dari berbagai laporan dan hasil survei, minat membaca bangsa kita ini tergolong memprihatinkan. Hasil survei United Nations Educational and Scientific Cultural Organization (UNESCO) beberapa waktu lalu, misalnya, menunjukkan minat membaca orang Indonesia secara keseluruhan bernilai 0,001.

Artinya, dari 1.000 orang Indonesia hanya ada satu orang yang memiliki minat membaca tinggi. Budaya membaca merupakan fondasi untuk mewujudkan cita-cita nasional menderdaskan kehidupan bangsa.

Para calon kepala daerah tampaknya lebih cenderung memelihara keluguan atau keawaman masyarakat dengan melakukan politik transaksional dalam meraih kemenangan dan kekuasaan. *Money politics* yang dilakukan tepat disebut sebagai pemanfaatan kerugian masyarakat. Mereka mengambil jalan pintas dengan membeli kekuasaan. Sebagian dari mereka masih enggan ikut menderdaskan kehidupan bangsa dengan pendidikan demokrasi politik kebangsaan yang berkualitas.

Salah satu sumber pembodohan rakyat dalam demokrasi yang paling dominan adalah uang. Penguasaan uang menjadi tolak ukurnya. Seberapa banyak uang yang dimiliki setara dengan peluang kemenangan akan diperoleh.

Akanhkah nilai-nilai demokrasi ini tergadaikan dengan rupiah atau mungkin dengan uang akan menjadi "penguasa"? Lebih membikin miris lagi kalau uang menjadi pangkal dan ujung demokrasi.

Inilah ironi pesta demokrasi kita, pesta demokrasi yang tidak meningkatkan kecerdasan bangsa. Tidakhkah kita mengingkarkan nilai demokrasi di negeri ini bisa tegak sebagaimana hakikatnya?

Bukan uang yang menjadi tolak ukurnya, namun amahan dan tanggung jawab sebagai rok demokrasi yang harus dijaga. Upaya meningkatkan mutu demokrasi di setiap pesta demokrasi dengan model kampanye yang berkualitas dan menderdaskan bangsa.

"Demokrasi" berasal dari bahasa Yunani "demos" (rakyat) dan "kratia" (pemerintahan). Artinya suatu bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan kepentingan bersama.

Nilai Demokrasi

Dengan pengakuan terhadap hak-hak rakyat ini, pemerintahan demokrasi dapat disebut pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat secara langsung maupun tidak langsung dapat menyampaikan pendapat melalui wakil-wakil mereka yang dipilih dan ditunjug oleh rakyat dan bukan menunjuk dirinya sendiri.

Berdasarkan hak-hak asasi manusia, setiap warga negara dalam sistem pemerintahan demokrasi memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan memiliki kebebasan untuk berserikat dan berkumpul untuk mendirikan organisasi politik tertentu.

Pemerintahan negara demokrasi didasarkan pada undang-undang dasar dan pelaksanaannya diawasi para wakil rakyat. Dengan demikian, kekuasaan dapat diserahkan kepada kelompok atau partai politik tertentu yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan umum (*Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 1989: 293)

Bercermin dari pengertian demokrasi tersebut, ada beberapa kata yang patut untuk dikaji lebih mendalam kandungan nilainya. Wakil rakyat itu ditunjug atau dipilih, bukan menunjuk. Dua kata namun sangat jauh maknanya.

Pertama, "ditunjug atau dipilih"

yang mengandung maksud memercayakan suatu amanah kepada yang ditunjug. Bagi yang ditunjug harus mampu menjaga amanah penuh dengan tanggung jawab tanpa pamrih.

Masyarakat memandang dan menilai yang ditunjug itu akan mampu melaksanakan amanahnya. Dari sudut pandang lain, biasanya orang yang ditunjug itu tidak punya niat untuk berbuat kesalahan atau menyalahi tanggung jawab karena telah dipercaya.

Selain itu, yang bersangkutan secara manusiawi tidak memiliki hasrat atau nafsu terhadap suatu jabatan. Mereka merasa terbebani amanah tersebut untuk mempertanggungjawabkannya kelak. Tidak adanya nafsu atau tendensi lain terhadap jabatan mengakibatkan apa yang akan terjadi (terpilih atau tidak ditunjug) bukan suatu permasalahan baginya.

Semua akan berjalan sewajarnya, tanpa pamrih apa pun. Jika ia terpilih, dengan segala konsekuensinya akan berusaha untuk mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Jiwa dengan sifat-sifat seperti itulah yang seharusnya dimiliki para kader politik kita.

Kader-kader militan yang arif penuh tanggung jawab dalam menjaga amanah, bukan jiwa-jiwa yang nihil dari nilai-nilai demokrasi. *Kedua*, "menunjug" mengandung makna memaksakan diri sendiri supaya terpilih mengemban kepercayaan dan amanah masyarakat.

Segala macam cara dan strategi ditempuh asalkan tujuan tercapai.

Entah berapa rupiah yang mereka investasikan demi suatu tujuan. Mereka berorientasi tujuan dengan pamrih tertentu. Bisa jadi kehendak untuk menjaga suatu amanah mulai luntur dari hatinya.

Setelah tujuan tercapai, kondisinya tidak lagi menjaga amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Bisa jadi malah menyimpang dari jalur yang seharusnya dilalui. Antara bagian luar dan dalam jiwanya tidak sama karena terkontaminasi lingkungan dan gaya hidup masa kini.

Apa pun jalur akan ditempuh demi kembalinya investasi. Kondisi itu secara kalkulasi bisnis masih diuntungkan daripada tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jiwanya kosong, yang terpikirkan hanyalah rupiah yang telah meninggalkannya.

Tak perlu heran, menang menjadi prioritas utama. Cara brutal pun ditempuh demi kekuasaan dan keserakahan. Di manakah kepercayaan dan amanah masyarakat yang selama ini menjadi bungkus atas suatu jabatan?

Menarik ketika kita berbicara tentang "amanah". Amanah harus dipertanggungjawabkan, bukan disia-siakan. Amanah merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dititipkan kepada orang lain atau suatu kelompok organisasi tertentu.

Dalam hal ini ada suatu kewajiban yang harus dilakukan guna menjaga kelestarian dan keamanan amanah tersebut. Seperti halnya perpustakaan berdasarkan UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan, UU ini mendudukkan perpustakaan sebagai institusi nonprofut penjaga gawang ilmu pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luas.

Perpustakaan jadi tempat pembelajaran sepanjang hayat. Suatu bentuk investasi besar dengan tujuan jangka panjang bagi terwujudnya cita-cita nasional menderdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan merupakan institusi yang diberi kepercayaan dan amanah untuk menjaga, melestarikan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan informasi kepada masyarakat luas melalui kekayaan koleksinya.

Siapa pun, dari status sosial dan latar belakang apa pun, dalam menunjang kebutuhan di bidang ilmu pengetahuan dan informasi dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhannya.

Dengan ragam koleksi, fasilitas, serta manajemen pengelolaan tertentu, perpustakaan harus senantiasa siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Perpustakaan harus siap memberi pelayanan tanpa pamrih, tanpa imbalan apa pun, demi kepuasan masyarakat penggunaanya.

Harapannya kelak akan terwujud masyarakat yang cerdas dan matang yang mampu menjadi pilar bagi kemajuan bangsa. Penguasaan atas ilmu pengetahuan dan informasi dapat mengantarkan masyarakat menjadi lebih maju tingkat peradabannya.

Masyarakat akan semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan dan persaingan di tengah arus globalisasi. Bukan lagi menjadi jiwa yang mandul terhadap nilai-nilai demokrasi, tetapi tumbuh menjadi jiwa yang matang dan siap bersaing secara sehat.

Masyarakat berkembang menjadi

mampu memahami kondisi, bukan lagi menajar menang dan kalah sebagai prioritas utama. "Menang" dengan segala tantangan dan hasil karya gemilang patut diteladani. "Kalah" harus siap dievaluasi dan dikoreksi demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Kondisi seperti itulah yang ditunggu oleh masyarakat kita yang telah merdeka 70 tahun. Merdeka yang hakiki secara lahir dan batin. Merdeka yang bermakna mampu menjaga kepercayaan dan amanah masyarakat. Tidak menodai nilai-nilai demokrasi atau menorehkan tinta merah yang mencoreng nilai-nilai demokrasi kita.

Isu Budaya Membaca

Para kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak semestinya memiliki kesadaran turut serta melaksanakan kewajiban menderdaskan kehidupan bangsa sebagaimana cita-cita luhur nasional kita.

Ini merupakan amanah yang harus ditunaikan oleh para pemimpin. Pemimpin demikian muncul dari pesta demokrasi yang berkualitas dan menghindari demokrasi transaksional yang dangkal.

Dengan bermodal kapasitas politiknya, kepala daerah dapat memainkan peran mengangkat isu besar tentang menderdaskan kehidupan bangsa melalui laku politik praktis kekuasaan yang mereka pegang maupun dalam kebijakan pembangunan daerah.

Tema meningkatkan budaya baca masyarakat tentu bisa menjadi tema yang menarik untuk digarap. Para kepala daerah terpilih semestinya memiliki strategi menyemai dan menyuburkan budaya membaca.

Isu budaya membaca secara politis dapat menjadi wacana yang pantas dilaksanakan dalam praksis pemerintahan. Para kepala daerah harus menggarap isu ini menjadi faktor pembeda di antara sekian banyak program pembangunan yang ditawarkan dan dilaksanakan.

Semangat menderdaskan kehidupan bangsa melalui perpustakaan mendapat payung hukum secara jelas, yakni UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan.

Di era digital seperti sekarang ini, ketika informasi tersebar dengan begitu masif serta begitu mudah untuk diakses, beragam informasi akan tersaji, mulai informasi sensasional, gosip, rumor, sampai informasi yang esensial.

Program kampanye minat membaca dan budaya membaca harus mendapatkan perluasan wacana. Program ini tidak sekadar membahasakan masyarakat dari buta aksara, namun juga memiliki muatan baru berupa literasi informasi.

Membaca untuk meretas kecerdasan bangsa. Membaca untuk memelihara kesadaran berpikir di tengah arus informasi yang sering kali dangkal dan sensasional penuh kegaduhan tanpa makna.

Pada titik tersebut setidaknya para kepala daerah terpilih bisa memainkan peran dari sisi politiknya. Mematangkan atau mendewasakan kehidupan demokrasi sekaligus ikut menderdaskan kehidupan bangsa melalui perpustakaan dan budaya membaca.

TAJUK

Pilkada untuk Kesejahteraan

Sebagian warga negeri ini, termasuk warga di Soloraya, kecuali di Karanganyar, baru saja menggalang hajatan besar pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015, Rabu (9/12). Kita bersyukur pesta demokrasi ini secara umum berjalan lancar dan aman. Hal ini menunjukkan kita semakin dewasa dalam berdemokrasi. Kita juga berharap iklim kondusif ini terus terjaga hingga penetapan pemenang pilkada dan pelantikan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih.

Siapa pasangan calon yang menang dan yang kalah bisa diprediksi dari hasil perhitungan cepat maupun hasil perhitungan sementara yang dilakukan sejumlah pihak. Di pilkada Kota Solo pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota petahana, F.X. Hadi Rudyatomo-Purnomo, unggul atas pasangan Anung Indo Susanto-M. Fajri.

Pilkada di Sukoharjo menunjukkan keunggulan Wardoyo Wijaya. Bila penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo seluruhnya menunjukkan penghitungan sementara, Wardoyo bisa dipastikan menang di periode kali kedua didampingi Purwadi sebagai wakil bupati. Pasangan ini mengungguli Nurdin-Anis Mudzhahir.

Kondisi yang sama terjadi di pilkada Boyolali. Pasangan Seno Samodro-Said Hidayat berdasar penghitungan sementara unggul atas pesaing mereka, pasangan Agus Purnanto-Sugiyarto.

Penghitungan sementara dari berbagai pihak di Sragen menunjukkan pasangan Kusdinur Untung Yuni Sukowati-Deby Endriyanto unggul. Di Klater, penghitungan sementara menunjukkan pasangan Sri Hartini-Sri Mulyani unggul dan di Wonogiri penghitungan sementara menunjukkan pasangan Joko Sutopo-Edy Santosa unggul.

Pasangan yang kalah harus berlapang dada, menerima apa pun hasil pilkada. Pasangan yang kalah memberikan ucapan selamat kepada yang menang akan mendukung pembudayaan demokrasi yang sehat Sikap yang sama juga harus ditunjukkan oleh tim sukses, pendukung, maupun para simpatisan. Jika ditemukan kekurangan atau kecurangan, tak perlu memobilisasi massa. Penyelenggara pilkada telah mengatur mekanisme penyelesaian. Ikuti saja aturan itu tanpa membuat gaduh, apalagi sampai mengganggu keamanan dan rasa nyaman masyarakat.

Pasangan yang menang tak perlu jemawa karena tanggung jawab besar menanti. Alangkah lebih baik jika pasangan pemenang merangkul pasangan lawan karena kontesati sudah usai. Pilkada hanya bagian dari proses demokrasi yang tujuan akhirnya mewujudkan pemerintahan berdaulat yang didukung masyarakat. Pilkada bukan untuk mengotak-atokkan masyarakat. Begitu pilkada selesai, kita kembali bersaudara, satu bangsa.

Pembedaan pilihan saat pilkada tidak perlu diperparang. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah mengawasi proses pilkada selanjutnya, yakni perhitungan suara. Pastikan tak ada manipulasi suara dan kecurangan lainnya yang akan membuat pilkada ternoda. Kita juga perlu memastikan pemenang pilkada tak lupa janji mereka selama kampanye. Masyarakat jangan mau dibodohi begitu saja. Tagih janji mereka. Bagi pasangan pemenang, kita tunggu gebakan dan realisasi janji-janji untuk menyejahterakan masyarakat.

NUWUN SEWU

- Desakan Ketua DPR Setya Novanto untuk mundur semakin kencang.
- "Tupai"-nya masih pandai melompat.
- Sehari menjelang pilkada, politik uang merajalela di sejumlah daerah di Soloraya.
- Siap-siap balik modal.

Kang Mase

POS PEMBACA

Mencermati Kelembagaan Petani dalam Program Upsus Pajale

Negara ini mempunyai mimpi besar mencapai swasembada pangan. Negeri ini wilayahnya memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan iklim yang menguntungkan untuk segala kegiatan pertanian. Sebagian besar rakyat Indonesia menggantungkan hidup pada usaha di bidang pertanian dan tentu tidak mengherankan bila impian besar mencapai swasembada pangan seperti yang pernah dicapai negeri ini semasa Orde Baru dapat terwujud kembali.

Masih banyak warga negeri ini yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Kebutuhan dasar yang layak bagi kemandirian belum sepenuhnya terpenuhi yakni pangan, sandang, dan papan.

Swasembada yang diupayakan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan petani selaku pelaku utama bidang pertanian. Jangan sampai petani tidak menikmati hasil swasembada yang mereka kerjakan dengan susah payah di bawah tekanan target.

Pemerintah melakukan berbagai upaya agar swasembada pangan itu segera tercapai. Kementerian Pertanian membuat program upaya khusus swasembada padi, jagung,

dan kedelai (upsus pajale).

Banyak bantuan diberikan kepada petani. Bantuan tersebut berupa alat dan mesin pertanian (alsintan), sarana produksi pertanian (saprotan), serta pendampingan oleh bintang pembina desa (babinsa) dan mahasiswa.

Petani melalui kelembagaan kelompok tani (poktan) diharapkan dapat memanfaatkan bantuan ini secara maksimal. Untuk menyambut dan mengelola bantuan-bantuan tersebut bukan saja peningkatan kelas kemampuan poktan yang diperlukan, namun yang lebih penting dan harus menjadi perhatian adalah penyegaran kepemimpinan poktan.

Banyak yang sudah puluhan tahun menjadi pengurus poktan dan umur mereka kebanyakan sudah sepuh. Untuk mengelola bantuan-bantuan tersebut dan untuk menjalankan roda organisasi kelompok diperlukan tenaga dan pikiran yang masih segar.

Kenyataan menunjukkan kelembagaan poktan belum dikelola dengan baik. Banyak jenis program bantuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani tidak berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

Suatu program akan berjalan

dengan baik bila semua lini bisa bersinergi. Sangat disayangkan jika suatu program yang besar, dengan dana berlimpah, dengan melibatkan banyak pihak, tetapi lemah pada satu lini.

Hasilnya tidak akan maksimal dan tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Memerlukan waktu yang lama untuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani dalam melaksanakan kegiatan usaha tani.

Ujung tombak keberhasilan program upsus pajale ini adalah petani itu sendiri, apakah petani sudah melaksanakan anjuran dan apakah petani sudah menerapkan teknologi yang diberikan.

Melalui wadah kelembagaan poktan diharapkan petani berhasil dalam usaha tani karena poktan merupakan pintu masuk bagi seluruh bantuan dan penyuluhan. Kemampuan pengurus poktan menjadi penting untuk dicermati para pihak.

Kemampuan manajerial pengurus poktan dipengaruhi beberapa hal, antara lain tingkat pendidikan dan usia. Tingkat pendidikan ini berafiliasi dengan pola pikir dan kualitas sumber daya manusia.

Wawasan yang kurang akan sulit menerima inovasi baru

dan rendah dalam penguasaan teknologi, sementara petani selaku anggota poktan cenderung menerima informasi dari para pengurus poktan.

Pencapaian hasil tidak akan optimal karena lambatnya perubahan dalam kegiatan usaha tani. Tidak bisa dimungkiri pula bahwa beberapa poktan berhasil membawa anggotanya mencapai kesejahteraan dari usaha tani.

Masih lemahnya sebagian besar kelembagaan poktan menjadi tantangan tersendiri dan tentunya harus mendapat perhatian lebih mengingat semua bantuan akan langsung diberikan kepada petani melalui poktan.

Agar program upsus pajale sukses sesuai target dan sukses berkelanjutan, serta petani turut merasakan secara maksimal hasil jerih payah merek, jangan sepelekan tiga hal berikut.

Pertama, ada jaminan harga yang pantas untuk hasil produksi pertanian mereka.

Kedua, ada peningkatan kelas kemampuan poktan.

Ketiga, penyegaran pengurus poktan.

Arie Utoyo
Mahasiswa Sekolah Tinggi
Penyuluhan Pertanian (STPP)
Yogyakarta